BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jalan Pramuka Nomor 11, Kota Padang
Telp. 0751-7055301/7055304 Fax. 0751-7055302
website :http://sumbar.bawaslu.go.id

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 036.a/BAWASLU-SB/SET/KP.04.00/VIII/2019

TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA BARAT

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan supporting sistem kesekretariatan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.;

b. bahwa dalam rangka penataan organisasi, optimalisasi pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 dan Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan

1. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0625/K.Bawaslu/KP.03.02/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang permohonan pembatalan/penundaan penarikan PNS yang diperkerjakan/diperbantukan/ditugaskan pada Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum.
2. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 0194/K.Bawaslu/PR.03.00/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini dan kepadanya diberikan honorarium kesekretariatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Bupati se-Sumatera Barat;
4. Walikota se-Sumatera Barat;
5. Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
7. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
8. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 30 Agustus 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPALA SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KARNALIS KAMARUDDIN, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680813 199103 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 036.a/BAWASLU-SB/SET/KP.04.00/VIII/2019

Tanggal : 30 Agustus 2019

Tentang : Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat

NO	Nama	NIP	Pangkat dan golongan	Kabupaten/Kota	Jabatan		Keterangan
					Sebelum	Sekarang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Riky Falantino, S.Kom	197901192003121005	Pembina/ IV/a	Kota Pariaman	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pariaman dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pariaman	Diberikan Honorarium kesekrretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
2	Rinaldi, S.Sos	196402051986031034	Pembina / IV/a	Kota Payakumbuh	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Payakumbuh dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Payakumbuh	Diberikan Honorarium kesekrretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
3	Anton Wira Tanjung, S.Pi	198011052009021001	Penata Tingkat. I / III/d	Kabupaten Padang Pariaman	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka Pemilihan Umum	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Diberikan Honorarium kesekrretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan

					Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019		
4	Yoni Susilo Nasti, SE	197509142007011005	Penata Muda Tk I / III/b	Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan	Diberikan Honorarium kesekrretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
5	Nasio, SE	1969081319990021001	Penata tk I / III/d	Kabupaten Sijunjung	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sijunjung dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Diberikan Honorarium kesekrretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
6	Agustin Melta, S.Sos	197008021994031004	Penata tk I / III/d	Kota Solok	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Solok dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Diberikan Honorarium kesekrretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
7	Agung Rohadiat, S.Pd	1963031719850031002	Penata tk I / III/d	Kota Sawahlunto	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Sawahlunto dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif dan	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Sawahlunto	Diberikan Honorarium kesekrretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan

					Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019		
8	Hengky Eka Putra, S.IP	198002262011011001	Penata / III/c	Kota Padang	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Padang dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Padang	Diberikan Honorarium kesekrretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
9	Refki Mukhliza, SH, MH	197212092007011005	Penata / III/c	Kabupaten Pasaman	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman	Diberikan Honorarium kesekrretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
10	Feri Iswandi, S.Sos	197404222002121003	Penata Tk I/ III/d	Kabupaten Tanah Datar	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Diberikan Honorarium kesekrretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
11	Misni, S.Sos	196406171986102006	Penata Tk I/ III/d	Kota Bukittinggi	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bukittinggi dalam rangka Pemilihan	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bukittinggi	Diberikan Honorarium kesekrretariatan sesuai dengan Peraturan dan

					Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019		Perundang-Undangan
12	Drs. Hazwan	196410071993021001	Penata Tk I / III/d	Kabupaten Kep. Mentawai	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	Diberikan Honorarium kesekrretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
13	Indra, SE, M. Si	196605041988121002	Pembina / IV/a	Kabupaten Pasaman Barat	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat	Diberikan Honorarium kesekrretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
14	Zulhairi, S.Pd.I	197908082003121005	Penata Tk I / III/d	Kota Padang Panjang	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Padang Panjang dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Padang Panjang	Diberikan Honorarium kesekrretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan

15	Redha Akmal, S.Pi	198307252008011006	Penata / III/c	Kabupaten Dharmasraya	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Dharmasraya dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Dharmasraya	Diberikan Honorarium kesekrretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
16	Mellia Rahmi, S.IP	198105082011012001	Penata / III/c	Kabupaten 50 Kota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten 50 Kota dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten 50 Kota	Diberikan Honorarium kesekrretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
17	Beni Darwata, S.ST	197906162000031003	Penata Tk I/ III/d	Kabupaten Solok	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Diberikan Honorarium kesekrretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
18	Yuli Zamra, S.Sos	197205261994031002	Penata Tk I/ III/d	Kabupaten Agam	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam	Diberikan Honorarium kesekrretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan

					Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019		
19	Admi Munandar, S.Si	198205282009011009	Penata / III/c	Kabupaten Solok Selatan	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Diberikan Honorarium kesekrretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPALA SEKRETARIAT

KARNALIS KAMARUDDIN, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680813 199103 1 008